



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap kepala SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada perencanaan stategik yang disusun oleh masing-masing instansi bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

I. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkup tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang

cukup padat. Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu (1) perumahan, (2) kawasan permukiman, (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan (5) Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan Permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3), (6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

II. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”**. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu **“ Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup”**.

III. Aspek Strategis Organisasi

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dua urusan wajib sekaligus yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Lingkungan Hidup.
2. Urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang tergolong pelayanan dasar. Sementara urusan bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan non pelayanan dasar.

3. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersentuhan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman identik dengan pembangunan fisik yang menunjang citra suatu kota. Kebutuhan untuk pengembangan kawasan untuk perumahan dan permukiman akan selalu terjadi seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, di dalam tata ruang wilayah suatu daerah, perumahan dan permukiman akan tetap menjadi prioritas dalam penetapan kawasan budidaya. Diperlukan kesiapan yang optimal dalam penyelenggaraan urusan tersebut, seperti ketersediaan aturan/regulasi, kesiapan anggaran dan personil pengelola.
4. Untuk urusan Lingkungan Hidup, meskipun termasuk non pelayanan dasar, namun penyelenggaraan urusannya memerlukan penguatan koordinasi dengan berbagai sektor pelaksana pembangunan. Urusan Lingkungan Hidup biasanya menempati fungsi kontrol/pengendalian dalam suatu kegiatan pembangunan, meliputi pencegahan dampak, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Bahkan tak jarang fungsi pencegahan dampak justru dimaknai sebagai penghambat kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang.
5. Masuknya pengelolaan persampahan dalam urusan lingkungan hidup, semakin memperluas cakupan tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya ragam kegiatan masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. Sementara disisi lain, keberadaan lingkungan yang nyaman dan bersih dari sampah semakin menjadi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang menjadi salah satu aspek strategis yang melekat pada tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

IV. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Dalam pelaksanaan tupoksi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diantaranya:

1. Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian.
2. Jumlah rumah tidak layak huni relatif masih banyak
3. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan
4. Masih tingginya kebutuhan Rumah (Backlog)
5. Kurangnya sarana pengolahan limbah domestik

6. Tingginya tingkat pencemaran air permukaan
7. Sudah sangat terbatasnya daya tampung TPA Sungai Andok
8. Masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap ketentuan izin lingkungan
9. Masih lemahnya penanganan limbah B3 (bahan berbahaya beracun)
10. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Masih terbatasnya data, informasi dan sarana terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (Taman Kehati)
12. Masih kurangnya kapasitas SDM pelaksana (kuantitas dan kualitas)
13. Kurangnya sarana prasarana kantor

V. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

VI. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas
Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	18	22	40
2	Tenaga Harian Lepas	180	26	206
	Jumlah	205	36	246

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 246 (Dua ratus empat puluh enam) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 40 (empat puluh) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 206 (dua ratus enam) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan kota, THL kantor, THL Rusunawa dan THL Labor.

Tabel.1.2
Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	-
	Golongan II	8	2	10	25
	Golongan III	12	14	26	65
	Golongan IV	3	1	4	10
	Jumlah	23	17	40	100

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 4 (empat) orang.

VII. Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
- b. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- b. Meningkatnya Kualitas Air, udara dan tutupan lahan
- c. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

B. Indikator Kinerja

Penetapan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019, merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019. Pokok-pokok dari penetapan kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1.

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.2.

D. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2019, mengacu pada tupoksi dan kewenangan yang melekat pada organisasi. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1.

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	96%	96%
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	40,50-41,40	40,50-41,40
		Indeks Kualitas Udara	90-93,5	90-93,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	61,92%	61,92%

Tabel 2.2.

Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana permukiman	1. Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman 2. Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman 3. Penyediaan dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman 4. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 5. Pengembangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	1. Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan Operasional Kebersihan Perkotaan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
		2. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Koordinasi Penilaian Adipura 2. Pemberdayaan kader lingkungan hidup 3. Pengembangan Program Adiwiyata 4. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

			5. Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
			6. Pengembangan Data dan informasi lingkungan
			7. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah
		3. Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Pengujian kualitas lingkungan
			2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
		4. Pengendalian Pembangunan berkelanjutan	1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup
			2. Penyusunan KLHS
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	1. Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	1. Bantuan rehab rumah menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
			2. Bantuan rumah layak huni bagi warga korban bencana
			3. Bantuan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
			4. Fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang membutuhkan

Tabel 2.3.

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Persentase permukiman layak huni	96%	Program:	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	
				Kegiatan:	Pemeliharaan Prasarana Permukiman	310.670.000
				Kegiatan:	Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	2.912.170.858
				Kegiatan:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	3.467.353.406
				Kegiatan:	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	3.046.244.000
				Program:	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	
Kegiatan:	Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU	196.750.000				
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	40,50-41,40	Program:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
		Indeks Kualitas Udara	90-93,5	Kegiatan:	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	259.800.000
		Indeks Kualitas Tutupan lahan	65,26		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan	6.908.502.350
				Kegiatan:	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan	194.825.000
				Kegiatan:	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	679.694.000
				Program:	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	
				Kegiatan:	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	218.075.000
				Kegiatan:	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	133.025.000

				Kegiatan:	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	54.550.000
				Kegiatan:	Pengembangan Adiwiyata	584.665.000
				Kegiatan:	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	48.500.000
				Kegiatan:	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	34.450.000
				Program:	Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	
				Kegiatan:	Pengujian Kualitas Lingkungan	172.475.000
				Kegiatan:	DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	611.892.800
				Program:	Pembangunan Berkelanjutan	
				Kegiatan:	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.890.000
				Kegiatan:	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	14.138.000
				Program:	Pengendalian Perubahan Iklim	
				Kegiatan:	Pengendalian Dampak Perubahan IKlim	129.075.000
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	61,92%	Program:	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	
				Kegiatan:	Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	196.652.000
				Kegiatan:	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	377.650.000
				Kegiatan:	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	87.500.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase permukiman layak huni	96%	97,54%	102
		2	Indeks Kualitas Air	40,50-41,40	37,37	92
2	Air, udara dan tutupan lahan	2	Indeks Kualitas Udara	90-93,5	91,52	100
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26	100
		1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	61,92%	74,84%	121

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman telah tercapai lebih dari 100%. Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan, baru indikator Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang mencapai target, untuk Indeks Kualitas Air masih belum mencapai target. Sementara untuk sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin telah tercapai 100%. Kedua sasaran diatas merupakan pendukung misi ke-1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Penjelasan lebih rinci dari pencapaian sasaran terhadap masing-masing indikator kinerja diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Sasaran strategis diatas pencapaiannya diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran 1

	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Persentase permukiman layak huni	96%	97,54%	102

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman telah tercapai 102%. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permukiman layak huni diantaranya terpenuhinya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai (jalan lingkungan permukiman, drainase, air bersih dan pengelolaan sampah).

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase permukiman layak huni	89%	94,59%	97,54%

Dari table diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase permukiman layak huni dari tahun ke tahun. Capaian ini dapat meningkat karena adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase yang dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman**, dilakukan melalui 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu:

- I. **Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemeliharaan Prasarana Permukiman
 2. Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
4. Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman

II. **Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Program

No	Program		Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	1	Persentase PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	81%	84,16%	104
2	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	1	Rasio Rumah Layak Huni	93,54	92,86	99,27

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman telah tercapai 104%. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman yang telah ada, melakukan pembangunan turap/talud yang sesuai standar, melakukan rehab dan pemeliharaan ruas jalan lingkungan permukiman, melakukan peningkatan sarana dan prasarana drainase permukiman dan melalui pengurangan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Indeks Kualitas Air	40,50-41,40	37,37	92%
2	Indeks Kualitas Udara	90-93,5	91,52	100%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran ke-2 terdiri atas tiga indikator, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Dari tiga indikator tersebut satu diantaranya yaitu Indeks Kualitas Air belum mencapai target, sementara dua indikator lain yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah mencapai target 100%.

Indeks kualitas Kualitas Air didapatkan dengan menganalisa parameter-parameter seperti TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Sementara Indeks Kualitas udara, didapat dengan menganalisa parameter SO₂ dan NO₂. Dan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Secara nasional target IKA ditetapkan sebesar 55, IKU 84 dan IKTL 62. Dari target masing-masing indikator terlihat bahwa target untuk kualitas air Kota Padang Panjang lebih rendah dari target nasional. Namun target kualitas udara kota lebih tinggi dibandingkan target nasional, karena kecenderungan yang terjadi selama ini kualitas udara di Padang Panjang relatif baik. Untuk indeks kualitas tutupan lahan, indeks Kota Padang Panjang juga sedikit lebih tinggi dari indeks nasional karena keberadaan hutan yang cenderung tidak mengalami perubahan.

Rendahnya kualitas air terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Sumber pencemar yang beragam memberi kontribusi terhadap tingginya pencemaran air. Selain itu tingkat pencemaran yang tinggi sudah terdektesi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga. Perbaikan kualitas air ini tidak akan mungkin terwujud jika hanya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Kewenangan utama dari instansi pengelola lingkungan hidup lebih diutamakan pada pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan. Artinya instansi pengelola lingkungan hidup merupakan OPD yang memiliki fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan, sementara teknis pengelolaan seharusnya menjadi tanggung jawab dari pelaku atau pemilik usaha/kegiatan/aktivitas. Selanjutnya pembinaan terhadap teknis pengelolaan lingkungan menurut sektor tentunya menjadi tanggung jawab dari OPD yang membidangi sektor terkait. Misalnya yang bertanggungjawab memberikan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan dari suatu kegiatan industri adalah OPD yang membidangi perindustrian.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa rendahnya Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah (sampah dan tinja), sehingga tercemarnya sebagian besar sungai. Kondisi ini terbukti dengan tingginya kandungan bakteri Total Coli dan Fecal Coli. Kedua parameter ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang.
2. Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD terhadap berbagai aktivitas sumber pencemar (seperti dapur rumah makan, rumah yang tidak memiliki septiktank, limbah pertanian, dll) yang belum mengelola limbahnya sesuai aturan.

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Indeks Air	Kualitas	44,04	40,88	37,37
Indeks Kualitas Udara		99,57	92,41	91,52
Indeks Kualitas Tutupan Lahan		65,26	65,26	65,26

Dari table diatas terlihat bahwa terjadi penurunan Indeks Kualitas Air dari Tahun 2017 ke Tahun 2019. Ada beberapa hal yang dapat diindikasikan dari kondisi ini antara lain:

1. Sumber pencemar yang bertambah dari waktu ke waktu
2. Peningkatan volume limbah (padat dan cair) yang dibuang ke sungai
3. Pengurangan debit air sungai sehingga meningkatkan konsentrasi pencemar
4. Tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan yang semakin menurun

Untuk Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2019 karena adanya Perubahan metode pengukuran kualitas udara. Pada tahun sebelumnya pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan menggunakan metode manual aktif, sedangkan untuk tahun 2018 menggunakan metode Passive sampler. Penggantian metode pengukuran merujuk pada metode yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghitung Indeks Kualitas Udara yaitu metode Passive Sampler.

Sementara Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berada pada indeks yang sama. Karena indeks tutupan lahan diukur dengan memperhitungkan luas hutan lindung dan hutan kota, maka berdasarkan data yang ada, luasan ini tidak mengalami perubahan.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**, dilakukan melalui 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan yaitu:

- I. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 4. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA.
- II. **Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
 2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
 3. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem;
 4. Pengembangan Adiwiyata;
 5. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan;
 6. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- III. **Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengujian Kualitas Lingkungan;
 2. DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan);
- IV. **Program Pembangunan Berkelanjutan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- V. **Program Pengendalian Perubahan Iklim**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	1 Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (sesuai Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah)	80%	70,20%	87,75
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1 Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	-	

3	Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1	Persentase mutu air pada tingkat cemar sedang	45%-43%	42.86%	97,67
4	Pembangunan Berkelanjutan	1	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	40%	29.11%	72,77
5	Pengendalian Perubahan Iklim	1				

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (sesuai Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah) terealisasi 87,75%. Belum tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan karena penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga membutuhkan perhatian berbagai pihak. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam penanganan sampah mempengaruhi jumlah sampah yang tertangani. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan dan melakukan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat.

Untuk indikator jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup, realisasinya masih menunggu pengumuman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk indikator Persentase mutu air pada tingkat cemar sedang realisasi masih dibawah target yaitu 97,67%. Belum tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah (sampah dan tinja), sehingga tercemarnya sebagian besar sungai dan belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD terhadap berbagai aktivitas sumber pencemar (seperti dapur rumah makan, rumah yang tidak memiliki septiktank, limbah pertanian, dll) yang belum mengelola limbahnya sesuai aturan.

Untuk indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan realisasi masih dibawah target 72, 77%. Belum tercapainya target dipengaruhi oleh masih kurangnya ketaatan objek usaha terhadap perizinan lingkungan, pelaksanaan dokumen lingkungan dan pelaporan. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengakomodir ketaatan terhadap perizinan, pelaksanaan dan pelaporan dokumen lingkungan, dan belum adanya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) sehingga sanksi terhadap objek usaha yang tidak taat belum bias diterapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketaatan yaitu dengan melakukan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan izin lingkungan.

Sasaran Strategis 3	: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
----------------------------	---

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	61,92	74,84	121%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau telah tercapai 121%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target ini salah satu nya adalah karena tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat yang memadai.

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 3 dalam 3 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	79,32	59,92	74,84

Dari tabel diatas terlihat bahwa cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Data Tahun 2017 menunjukkan angka yang cukup tinggi, berdasarkan perhitungan SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu sebesar 79,32%. Namun pada Tahun 2018 terlihat penurunan yang cukup signifikan menjadi 59,92%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber data perumahan yang yang digunakan. Jika sebelumnya (Tahun 2017) data perumahan yang digunakan berasal dari baseline data Bidang Perumahan dari Provinsi Sumatera Barat, maka pada Tahun 2018, perhitungan dilakukan dengan menggunakan baseline data dari Provinsi Sumatera Barat yang divalidasi oleh SNVT. Dan pada Tahun 2019 data yang dipakai adalah data hasil survey RP3KP yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang Tahun 2019. Namun dari tiga tahun berturut-turut tersebut, kegiatan rehab rumah layak huni mengalami peningkatan. Tahun 2017 kegiatan rehab rumah tidak dialokasikan, baik dari APBD maupun APBN. Tahun 2018 bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 110 unit di Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Rakyat. Dan Tahun 2019 terlaksana bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 200 unit, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Rakyat 100 unit dan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat 100 unit.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, dilakukan melalui 1 Program 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- I. Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman
 1. Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa;
 2. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 3. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
2	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	1 Rasio Rumah Layak Huni	93,54	92,86	99,27

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman telah tercapai 104%. Hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan perumahan bagi rumah yang tidak layak huni sebanyak 100 unit dan beroperasionalnya Rusunawa bagi masyarakat tidak mampu.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman			
		Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana Permukiman	310.670.000	308.569.000	99,32
		Kegiatan : Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	2.912.170.858	2.633.301.031,9	90,42

		Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	3.467.353.406	3.360.500.406	96,92
		Kegiatan : Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	3.046.244.000	3.023.045.100	99,24
		Program : Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman			
		Kegiatan : Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU	196.750.000	176.518.230	89,72
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan			
		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	259.800.000	236.335.800	90,97
		Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6.908.502.350	6.158.548.938	80,74
		Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	194.825.000	170.374.340	87,45
		Kegiatan : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	679.694.000	615.441.835	90,55
		Program : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan			
		Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	218.075.000	190.354.550	87,29
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	133.025.000	104.329.300	78,43
		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	54.550.000	49.232.350	90,25
		Kegiatan : Pengembangan Adiwiyata	584.665.000	467.538.650	79,97
		Kegiatan : Pengembangan Data dan informasi Lingkungan	48.500.000	41.708.750	86,00
		Kegiatan : Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	34.450.000	19.061.400	55,33
		Program : Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam			
		Kegiatan : Pengujian Kualitas Lingkungan	172.475.000	163.521.880	94,81
		Kegiatan : DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	611.892.800	192.824.000	31,51
		Program : Pembangunan Berkelanjutan			

		Kegiatan : Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.890.000	10.185.375	93,53
		Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	14.138.000	8.973.600	63,47
		Program : Pengendalian Perubahan Iklim			
		Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	129.075.000	116.444.450	90,21
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Program : : Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman			
		Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	196.652.000	142.718.994	72,57
		Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	377.650.000	341.981.000	90,56
		Kegiatan : DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	87.500.000	72.253.875	82,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi selama tahun 2019 sudah cukup baik yaitu 90,09%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya masih rendah, yaitu

1. Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa, dengan realisasi keuangan 72,57% atau sebesar Rp. 142.718.994,-. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayarkan sesuai kebutuhan dan efisiensi anggaran.
2. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dengan realisasi keuangannya 55,33% atau sebesar Rp.19.061.400,-. Hal tersebut disebabkan karena adanya optimalisasi pelaksanaan rapat-rapat tim dengan cara menggabungkan beberapa jadwal rapat, hal ini yang menyebabkan tidak maksimalnya realisasi anggaran, terutama di kegiatan makan minum rapat.
3. DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan), dengan realisasi keuangan hanya 31,51% atau sebesar Rp. 194.824.000,-. Rendahnya realisasi keuangan karena pengadaan Dump Truck tidak terealisasi, penyedia sudah ditetapkan sebagai pemenang, tetapi penyedia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan alasan sakit. Sementara itu tender ulang tidak dapat dilaksanakan karena entri data baru pada system pelaporan DAK OMSPAN telah ditutup.
4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, dengan realisasi keuangan hanya 63,47% atau sebesar Rp. 8.973.600,-. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pengawasan kehadiran

personil dari OPD lain tidak optimal sehingga biaya makan minum tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

C. Analisis Efisiensi Anggaran

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja dan Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman			
		Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana Permukiman	310.670.000	100	99,32
		Kegiatan : Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	2.912.170.858	94,86	90,42
		Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	3.467.353.406	98	96,92
		Kegiatan : Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	3.046.244.000	100	99,24
		Program : Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman			
		Kegiatan : Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU	196.750.000	100	89,72
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan			
		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	259.800.000	100	90,97
		Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6.908.502.350	90	89,14
		Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	194.825.000	100	87,45
		Kegiatan : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	679.694.000	100	90,55
		Program : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan			
		Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	218.075.000	100	87,29
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	133.025.000	100	78,43

		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	54.550.000	100	90,25
		Kegiatan : Pengembangan Adiwiyata	584.665.000	100	79,97
		Kegiatan : Pengembangan Data dan informasi Lingkungan	48.500.000	100	86
		Kegiatan : Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	34.450.000	100	55,33
		Program : Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam			
		Kegiatan : Pengujian Kualitas Lingkungan	172.475.000	100	94,81
		Kegiatan : DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	611.892.800	80	31,51
		Program : Pembangunan Berkelanjutan			
		Kegiatan : Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.890.000	100	93,53
		Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	14.138.000	100	63,47
		Program : Pengendalian Perubahan Iklim			
		Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	129.075.000	100	90,21
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Program : Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman			
		Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	196.652.000	100	72,57
		Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	377.650.000	100	90,56
		Kegiatan : DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	87.500.000	100	82,58

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya masih dibawah 100% yaitu :

1. Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman, dimana realisasi fisiknya sebesar 94,86%. Rendahnya realisasi fisik disebabkan karena adanya 1 lokasi pekerjaan yang belum terdaftar dalam RKBMD sehingga tidak dapat dilaksanakan pekerjaan tersebut.
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman, dimana realisasi fisiknya sebesar 98%. Rendahnya realisasi fisik disebabkan karena adanya 1 lokasi pekerjaan jalan setapak yang diusulkan di perubahan anggaran, tetapi tidak masuk RKBMD sehingga tidak dapat dilaksanakan pekerjaan tersebut.
3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, dimana realisasi fisiknya sebesar 90%. Rendahnya realisasi fisik disebabkan karena Pengadaan pakaian kerja tidak terealisasi karena Penyedia tidak bisa memenuhi barang yang diminta sesuai dengan kontrak sehingga putus kontrak.
4. DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan), dimana realisasi fisiknya 80%. Rendahnya realisasi fisik disebabkan karena Pengadaan Dump Truck tidak terealisasi, penyedia sudah ditetapkan sebagai pemenang, tetapi penyedia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan alasan sakit. Sementara itu tender ulang tidak dapat dilaksanakan karena entri data baru pada system pelaporan DAK OMSPAN telah ditutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengambil peran dalam penyelenggaraan dua urusan wajib yaitu bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan pelayanan dasar serta bidang lingkungan hidup yang non pelayanan dasar. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2019 menjadi tahun pertama pelaksanaan program Pemerintah Daerah untuk periode 2019-2023.

Sebagai OPD yang menangani dua urusan, pencapaian kinerja Tahun 2019 yang belum mencapai 100%, tentunya perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa perbaikan perlu dilakukan pada aspek pemantapan perencanaan yang diikuti dengan penetapan indikator yang jelas dan terukur. Disamping itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana, manajemen pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan serta pada strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

Ditinjau dari tingkat realisasi anggaran, penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 tergolong cukup baik, yaitu mencapai 90,09% dari total anggaran yang dikelola. Persentase ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup, diluar rutin kesekretariatan.

B. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja yang akuntable:

1. Melaksanakan pembekalan terhadap pejabat terkait mengenai sistem pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.
2. Meningkatkan pengetahuan teknis dalam membuat dan menetapkan indikator kinerja sehingga dapat terukur dengan secara tepat dan sesuai dengan langkah kerja yang dilakukan dalam suatu program atau kegiatan.
3. Menerapkan prinsip sinkronisasi dan konsistensi dalam penetapan indikator kinerja SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan kegiatan.
4. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian target kinerja.

5. Memperbaiki kinerja pelaporan melalui koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kinerja.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**



WITA DESI SUSANTI, ST
Pembina Tk. I / NIP. 19741223 200212 2 002